



LAPORAN KINERJA

BAKORWIL I MADIUN

TAHUN 2024

**Laporan Kinerja Bakorwil I
Madiun Tahun 2024 menyajikan
hasil pengukuran kinerja terhadap
realisasi dari target Indikator
Kinerja Bakorwil I Madiun yang
telah ditetapkan dalam Perjanjian
Kinerja Tahun 2024. Segenap
kemampuan, gagasan dan upaya
terbaik telah dicurahkan dalam
menjalankan tugas dan fungsi
masing-masing dengan hasil
kinerja seperti yang tertuang**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya semata, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Madiun Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bakorwil I Madiun ini merupakan wujud akuntabilitas kinerja atas upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024. Laporan Kinerja ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Menpan RB Noor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Tahun 2024 ini menyajikan hasil pengukuran sasaran kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Tahun 2024 yang disusun berdasarkan capaian Indikator Kinerja Bakorwil I Madiun tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Segenap kemampuan, gagasan dan upaya terbaik telah dicurahkan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dengan hasil kinerja seperti yang tertuang dalam laporan ini.

Dengan disusunnya LKjIP Bakowil I Madiun Tahun 2024 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi peningkatan kinerja bagi internal, dan menjadi media komunikasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi terkait kinerja Bakorwil I Madiun.



Madiun, Januari 2025

R. HERU WAHONO SANTOSO, S.Sos, M.M.

NIP. 19670221 198809 1 001

Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

PEMBUKA	KATA PENGANTAR.....	i
	DAFTAR ISI.....	ii
	RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	BAB I PENDAHULUAN.....	1
	A. Struktur Organisasi.....	2
	B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
	C. Cascading Kinerja.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
	A. Renstra Bakorwil I Madiun Tahun 2019-2024.....	12B
	B. Rencana Kerja Bakorwil I Madiun Tahun 2024.....	15
	C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
	A. Capaian Kinerja.....	16
	B. Realisasi Anggaran	42
	C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi.....	43
PENUTUP	BAB IV PENUTUP	45
	A. Kesimpulan	45
	B. Langkah yang akan dilakukan	46

LAMPIRAN:

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
2. Pohon Kinerja
3. Peta Proses Bisnis

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I :

- A. Struktur Organisasi
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Cascading Kinerja
(Keterhubungan dengan RPJMD)

Memperhatikan kondisi geografis Jawa Timur dan jangkauan rentang kendali cakupan wilayah 38 kabupaten/kota yang sangat luas, maka dibentuklah Bakorwil untuk membantu Gubernur melakukan koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi pemerintah kabupaten/kota. Bakorwil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2023 tentang kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan.

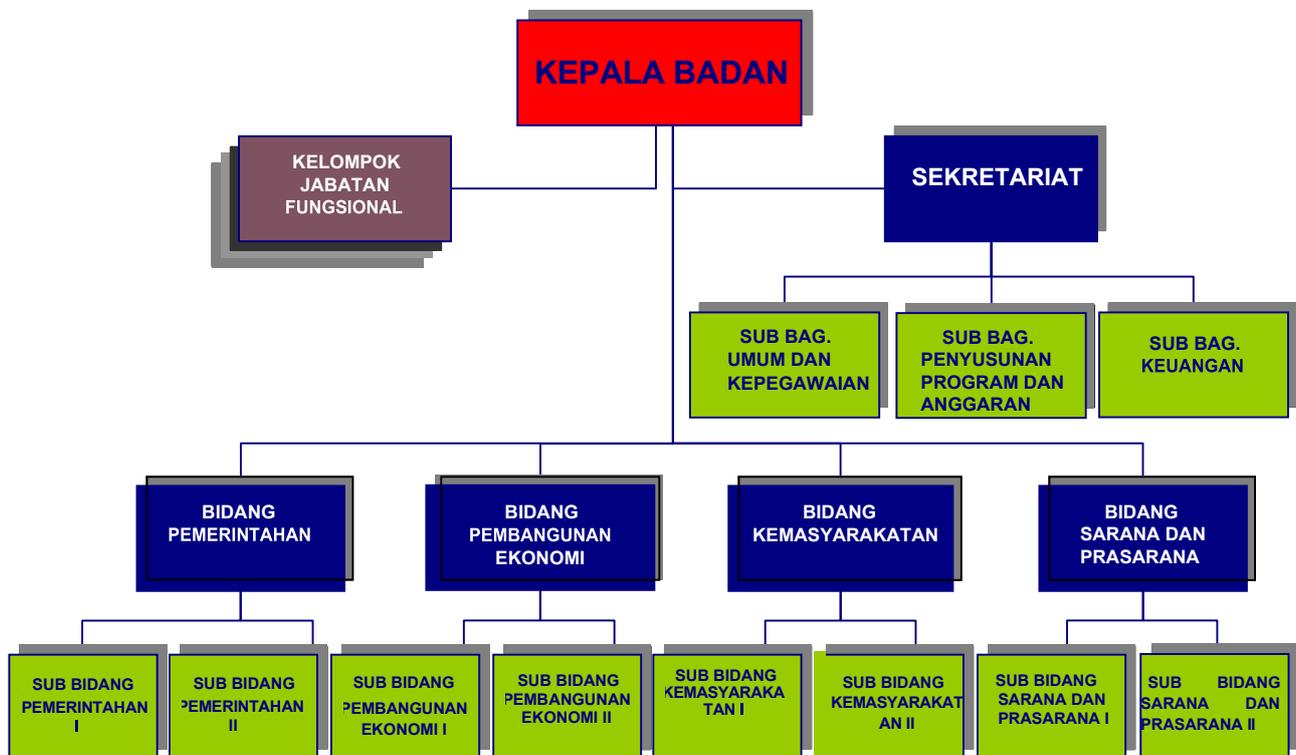
Memperhatikan hal tersebut, peran Bakorwil sangat strategis dalam mewujudkan visi Provinsi Jawa Timur yaitu **“Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong”** maka di dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024, Bakorwil fokus dalam misi ke-3 yaitu **Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi**

Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yaitu, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2016.

A. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Bakorwil I Madiun selengkapnya diilustrasikan sebagaimana bagan berikut ini:



B. Tugas Pokok dan Fungsi



Membantu Gubernur dalam melakukan koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bakorwil menyelenggarakan fungsi:



Perumusan kebijakan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya



Pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan antar pemerintah kabupaten/kota



Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan



Pemberian masukan/saran pertimbangan kepada Gubernur



Monitoring, evaluasi, dan supervisi penyelenggaraan pemerintahan



Pemberian rekomendasi kepada Gubernur atas usulan Dana Alokasi Khusus (DAK)



Pemberdayaan dan fasilitasi pemerintah kabupaten/kota



Optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah kabupaten/kota



Penyelarasan perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota



Dukungan teknis dan pengembangan potensi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Wilayah Kerja

Wilayah kerja Bakorwil I Madiun meliputi 8 Kabupaten dan 2 Kota, yaitu:



**“PAWITANDIROGO
TUNGGAL DIRI”
(PACITAN-NGAWI-
MAGETAN-MADIUN-
PONOROGO-
TULUNGAGUNG-
TRENGGALEK-KEDIRI)**

C. Isu Strategis

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bakorwil sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur maka terdapat beberapa permasalahan pembangunan dalam urusan “Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian, dan Persandian” sebagai berikut:

Tabel 3. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik	Masih ada ASN yang belum memahami mengenai Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
2	Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	Belum terpenuhinya semua sarana dan prasarana yang belum ada.
3	Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang belum sesuai dengan tupoksinya
4	Sumber Daya Manusia	Kemampuan Sumber Daya Manusia	Masih ada ASN yang kemampuannya belum sesuai dengan perkembangan teknologi.

D. Cascading Kinerja

Cascading Kinerja adalah proses penjabaran Sasaran Strategis, Indikator Kinerja (IKU) dan/atau Target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading Kinerja juga merupakan suatu dokumen pernyataan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA. Adapun Cascading Kinerja Bakorwil I Madiun sebagai berikut:

**Tabel Keterkaitan RPJMD dengan Renstra Bakorwil I
Madiun Tahun 2019 - 2024**

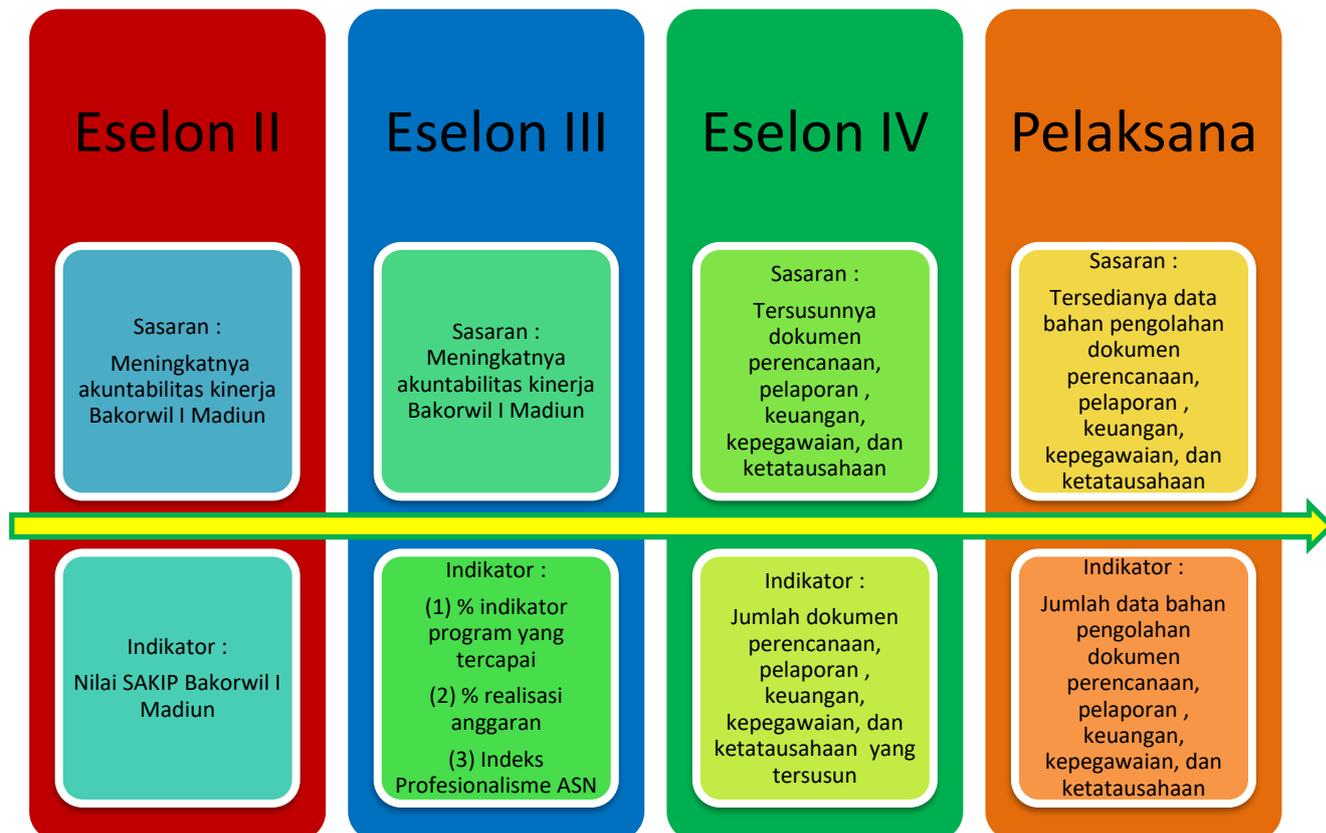
KETERKAITAN RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN RENSTRA BAKORWIL I MADIUN TAHUN 2019-2024	
RPJMD TAHUN 2019 - 2024	RENSTRA BAKORWIL I MADIUN TAHUN 2019 - 2024
<p>Visi : Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong</p>	<p>Tujuan : Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil I Madiun</p>
<p>Misi : Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan</p>	<p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bakorwil I Madiun 2. Meningkatnya Hasil Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
<p>Tujuan : Terwujudnya Pemerintahan yang Baik</p>	<p>Indikator Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti 2. Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun
<p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel; 2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintah. 	

SASARAN 1 :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bakorwil I Madiun

INDIKATOR :

Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun

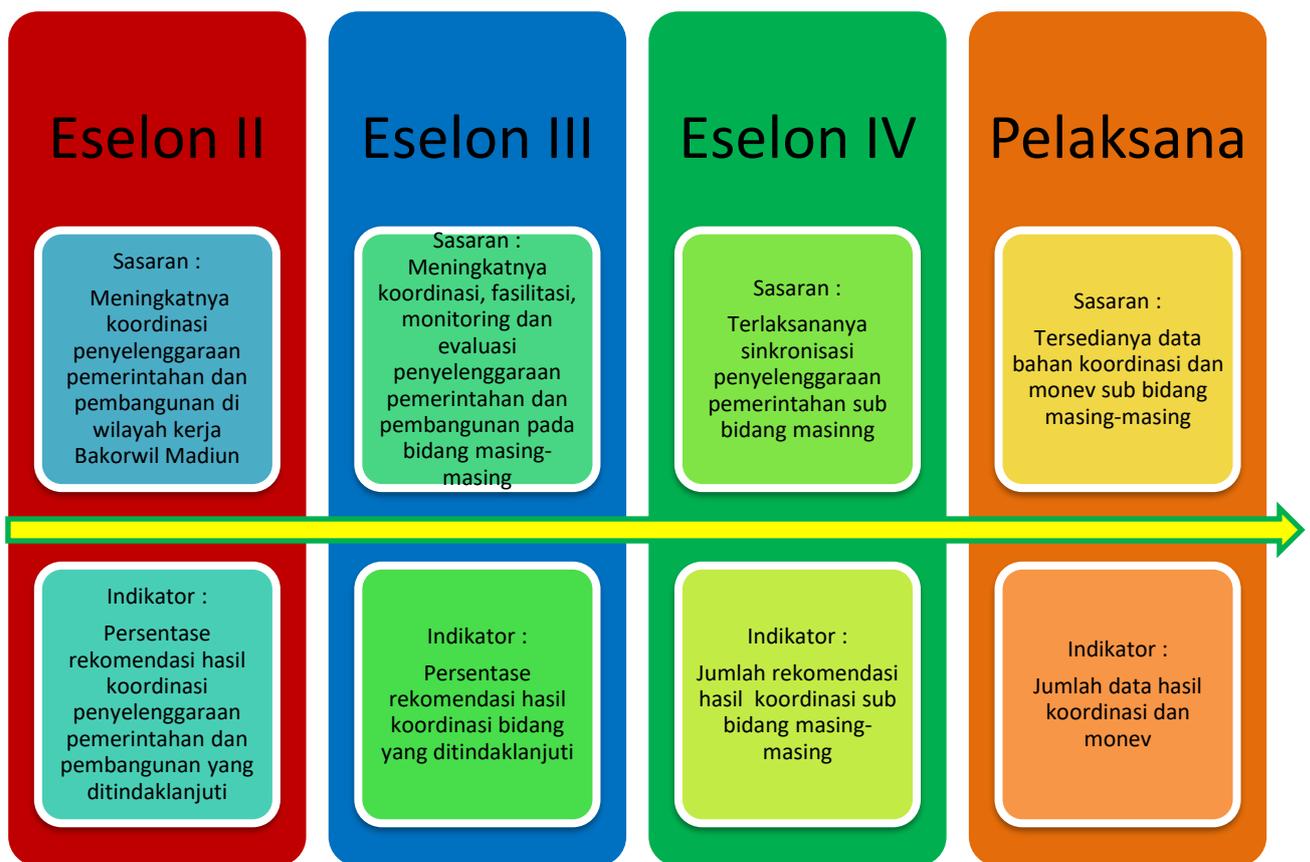


SASARAN 2 :

Meningkatnya Hasil Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil I Madiun

INDIKATOR :

Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti



Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Memperhatikan surat Gubernur Jawa Timur tanggal 29 November 2024, Nomor: 000.8.6.3/45739/031.2/2024 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bakorwil I Madiun Tahun 2024, hasil evaluasi menunjukkan bahwa Bakorwil I Madiun memperoleh nilai 87,85 atau predikat A (Memuaskan). Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Bakorwil I Madiun menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Komponen	Bobot	Nilai 2022
a	Perencanaan Kinerja	30	24,9
b	Pengukuran Kinerja	30	28,71
c	Pelaporan Kinerja	15	11,99
d	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	22,25
Nilai Hasil Evaluasi		100	87,85
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A (Memuaskan)

**Dasar : PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021*

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja, Tim Evaluasi merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa review Renstra yang dilakukan menjelaskan terkait capaian Renstra hingga tahun berjalan. Sertakan hasil laporan atau notula rapat yang membahas perubahan dalam Renstra untuk memastikan bahwa revisi dokumen mencerminkan perkembangan terkini;

2. Mendorong adanya peningkatan kualitas rencana aksi agar dapat memberikan gambaran strategi-strategi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang dituangkan benar benar memiliki keterkaitan secara langsung dan cukup untuk mempengaruhi pencapaian sasaran strategis/ kinerja Perangkat Daerah;
3. Mendorong pemanfaatan pohon kinerja yang telah disusun dengan menuangkannya ke dalam dokumen perencanaan dapat tergambar dengan baik;
4. Melakukan reuiu kembali terhadap dokumen IKU agar seluruh indikator kinerja utama yang diperjanjikan memiliki definisi operasional yang andal dengan memastikan formulasi perhitungan indikator kinerja relevan dengan ukuran kinerja yang akan diwujudkan;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dokumen Rencana Aksi dengan menjabarkan langkah-langkah perbaikan pencapaian kinerja dengan didukung target realisasi kinerja setiap triwulan sehingga dapat mengukur progres pencapaiannya secara berkala;
6. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis kinerja per-sasaran strategis serta merencanakan strategi/upaya yang akan dilakukan pada tahun berikutnya dalam rangka meningkatkan atau mempertahankan kinerja organisasi;
7. Menambahkan informasi mengenai rekomendasi yang diberikan dalam indikator kinerja “presentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan” untuk memudahkan evaluasi apakah semua rekomendasi telah ditindaklanjuti secara tepat. Ini akan memperjelas seberapa jauh rekomendasi mempengaruhi capaian kinerja.

8. Memastikan konsistensi target antara Renja dan LkjiP, khususnya untuk indikator "Presentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti". Konsistensi ini penting untuk memastikan keakuratan dalam pengukuran kinerja organisasi;
9. Memantau pelaksanaan kegiatan, pastikan monitoring dan evaluasi (monev) juga fokus pada pencapaian kinerja sasaran strategis. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan selaras dengan tujuan strategis;
10. Terus meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan menyampaikan temuan dan rekomendasi ke dalam LHE (Laporan Hasil Evaluasi) untuk kemudian ditandatangani oleh Tim SAKIP internal serta disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Renstra Bakorwil I Madiun Tahun 2019-2024

Rencana Strategis (Renstra) Bakorwil I Madiun Tahun 2019-2024 merupakan perencanaan jangka menengah Bakorwil I Madiun yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Penyusunan Renstra Bakorwil I Madiun Tahun 2019-2024 telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil I Madiun	-	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti
		1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bakorwil I Madiun	Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun
		2. Meningkatnya Hasil Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti

B. Renja Bakorwil I Madiun Tahun 2024

Berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja tahun 2024 yang ingin dicapai, maka disusunlah program dalam rangka mendukung suksesnya pencapaian kinerja Bakorwil I Madiun.

Program tahun 2024 yang dimaksud adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	PAGU
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.704.200.000
2	Program Pelayanan Penghubung	1.187.000.000
	JUMLAH	17.891.200.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Indeks profesionalisme ASN	82,5 %
		2. Presentase Indikator Program yang tercapai	100%
		3. Persentase realisasi anggaran	96%
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	7
	2) Administrasi Keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	1
	3) Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah laporan ketatausahaan dan kepegawaian	1

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
	4) Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	1
	5) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersusun	1
	6) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersusun	1
2.	Program pelayanan penghubung	Persentase rekomendasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kewilayahan yang ditindaklanjuti	85%
	7) Pelaksanaan pelayanan penghubung	Jumlah rekomendasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kewilayahan yang ditindaklanjuti	16 dok.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Bakorwil I Madiun Tahun 2024 dengan sasaran, indikator kinerja dan target capaiannya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bakorwil I Madiun	Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun	80,3
2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti	85%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.



CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bakorwil I Madiun	Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun	80,3	87,85	109%
2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti	85%	90%	106%
		Formula : % = $\frac{\text{jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah rekomendasi}}$ $= \frac{17}{16}$ $= 106\%$			

Indikator Kinerja 1 : Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, diketahui bahwa realisasi nilai SAKIP Bakorwil I Madiun tahun 2024 adalah 87,85, sedangkan target nilai SAKIP yang ingin dicapai adalah 80,3, sehingga capaian kerjanya 109%. Dalam hasil evaluasi SAKIP oleh Tim SAKIP Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa ada peningkatan nilai di komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan sedikit penurunan nilai di komponen pelaporan kinerja, sehingga perlu adanya upaya untuk memperbaiki komponen pelaporan kinerja dengan memastikan pada setiap jenjang jabatan selalu dilakukan monitoring, pengukuran, dan reviu kinerja internal secara berkala dan berjenjang serta memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan mekanisme tersebut.

Indikator Kinerja 2 : Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, diketahui bahwa realisasi persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti tahun 2024 adalah 85%, sedangkan target yang ingin dicapai adalah 100%. Rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti sudah tercapai sebesar 106% dari target 17 koordinasi yang ditindaklanjuti.

Adapun hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti sebanyak 17 (tujuh belas) koordinasi sebagai berikut:

NO	KOORDINASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
1.	<p>Koordinasi dan Monitoring Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Selingkar Gunung Wilis Tahun 2024</p> 	<p>Surat Kepala Bakorwil I Madiun tanggal 21 Februari 2023 Nomor : 100/060.1/211.2/2023 kepada Walikota Madiun, Bupati Madiun, Bupati Magetan, Bupati Ngawi dan Bupati Ponorogo sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesepakatan Bersama (KSB) perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sesuai bidang dan sektor prioritas kebutuhan daerah yang dikerjasamakan antar Organisasi Perangkat Daerah terkait Kabupaten/Kota; 2. Dalam pelaksanaan Kerjasama antar daerah maupun dengan pihak ketiga perlu dukungan regulasi dan komitmen para pihak, program kerja, anggaran, sarana prasarana, SDM yang berkompeten, relasi dan partisipasi antara dinas/instansi/lembaga dan masyarakat; 3. Segera Dilakukan pembentukan Sekretariat Bersama Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan; 4. Perlu adanya peningkatan koordinasi, komunikasi, sinkronisasi, fasilitasi dan monitoring dalam pelaksanaan kerja sama antar daerah dengan melibatkan dinas/instansi/lembaga terkait;
2.	<p>Koordinasi dan Monitoring Desk Pemilu dan Pilkada Tahun 2024</p>	<p>Surat Bakorwil I Madiun kepada Gubernur Jawa Timur tanggal 20 Februari 2024 Nomor : 200.2.1/071.1/211.2/2024 perihal Rekomendasi Hasil Koordinasi dan</p>



Monitoring Desk Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Agar mengoptimalkan fungsi Desk Pemilu dan Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah untuk memantau persiapan pelaksanaan, menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan, memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan, dan melaporkan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di daerah;
2. Desk/Tim yang dibentuk agar bekerjasama dengan instansi terkait (KPU, Bawaslu, Polres, Kodim, dll) dalam pengolahan data perkembangan situasi politik di daerah, data tentang kepemiluan, dan data sementara hasil Pemilu;
3. Dalam menjaga kondisi politik, keamanan dan ketertiban umum di daerah yang kondusif, agar meningkatkan pengawasan, menjalin komunikasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait hingga ke tingkat desa/kelurahan;
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.

3. Koordinasi dan Monitoring Hasil Pemilu 2024 dan Persiapan Pilkada Serentak 2024

Surat Bakorwil I Madiun kepada Gubernur Jawa Timur tanggal 11 Juni 2024 Nomor : 200.2/185.2/211.2/2024 perihal Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Monitoring Hasil Pemilu 2024 dan Persiapan Pilkada Serentak 2024 di Wilayah Kerja Bakorwil I Madiun sebagai berikut :



1. KPU Kabupaten/Kota agar melaksanakan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Tingkatkan koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder terkait (penyelenggara, pengawas, pihak keamanan dan Pemerintah Daerah);
3. KPU Kabupaten/Kota agar memberikan sosialisasi/ pendidikan politik kepada pemilih pemula dan disabilitas;
4. Pelaksanaan dana hibah dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota agar dilakukan dan dipertanggungjawabkan secara lengkap, transparan dan akuntabel.

4. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024



Surat Bakorwil I Madiun kepada Gubernur Jawa Timur tanggal 20 September 2024 Nomor : 200.2/320/211.2/2024 perihal Rekomendasi Hasil Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 se-Wilayah Kerja Bakorwil I Madiun sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah agar memberikan dukungan penuh dalam mensukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan sumber daya sesuai ketentuan;
2. Perlunya perhatian khusus dan kerjasama semua pihak pada Pilkada Serentak Tahun 2024 terutama dengan calon tunggal di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Trenggalek, khususnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga Pilkada terlaksana dengan baik dan tidak perlu Pilkada ulang di tahun berikutnya;

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Perlunya kerja sama semua pihak untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan penanganan konflik pada Pilkada Serentak Tahun 2024; 4. Perlunya perhatian khusus berupa pembinaan dan pengawasan netralitas ASN di lingkungan pemerintah daerah agar tidak terjadi pelanggaran netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024; 5. Agar menerapkan cooling system dengan memberdayakan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan ormas-ormas besar untuk mendukung Pilkada damai dan bersih.
5.	<p>Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana dengan tema “Penanggulangan Bencana Urusan Bersama”</p> 	<p>Surat Bakorwil I Madiun kepada Gubernur Jawa Timur tanggal 11 November 2024 Nomor : 200.2/320/211.2/2024 perihal Rekomendasi Hasil Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana di Wilayah Kerja Bakorwil I Madiun Tahun 2024 sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penting dan perlunya sinergi, kolaborasi dan komitmen bersama dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana megathrust dan hidrometeorologi di wilayah kerja Bakorwil I Madiun; 2. BMKG mengungkapkan bahwa di wilayah kerja Bakorwil I Madiun ada 3 daerah yang berpotensi terdampak megathrust yaitu Tulungagung, Trenggalek dan Pacitan, sehingga pemerintah daerah dan seluruh stakeholder perlu menyiapkan mitigasi yang berkelanjutan; 3. Pemerintah daerah agar melaksanakan mitigasi bencana gempa dan tsunami dengan

		<p>meningkatkan literasi, sosialisasi, dan simulasi kepada masyarakat, mensosialisasikan pembangunan rumah/gedung tahan gempa, dan penguatan komunitas siaga tsunami;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pemerintah daerah agar mewaspadai bencana hidrometeorologi di masa pancaroba yakni angin puting beliung, petir dan hujan es, dan mewaspadai bencana banjir, tanah longsor, dan gelombang tinggi di puncak musim hujan nanti; 5. Diharapkan seluruh stakeholder dan instansi terkait dapat berkoordinasi dan lebih peduli dengan informasi meteorologi untuk meminimalisir potensi kerugian dan dampak yang mungkin terjadi saat terjadi bencana; 6. Diharapkan agar masing-masing kabupaten dan kota di wilayah kerja Bakorwil I Madiun membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana lintas sektor perangkat daerah agar penanggulangan bencana menjadi lebih cepat, tepat dan efektif yang disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing perangkat daerah.
6.	<p>Rapat Koordinasi Ketersediaan dan Prosedur Lalu Lintas Ternak Qurban Menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 H Tahun 2024 se Bakorwil I Madiun yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2024.</p>	<p>Surat Kepala Bakorwil Madiun tanggal 17 Mei 2024 Nomor : 500.7/164/211.3/2024 Kepada Bapak Pj. Gubernur Jawa Timur melalui Bapak Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur perihal : Laporan Hasil Rapat Koordinasi Ketersediaan dan Prosedur lalu Lintas Ternak Qurban Menjelang Hari raya Idul Adha 1445 H Tahun 2024 se Bakorwil I Madiun Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok menjelang Puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 H Tahun 2023 :</p>



1. Dari data yang telah masuk ke Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur terkait Data ketersediaan dan data kebutuhan ternak qurban, secara umum potensi ketersediaan dan dan kebutuhan ternak qurban tahun 2024 di 10 (sepuluh) kabupaten/kota di wilayah Bakorwil I Madiun masih tercukupi ;
2. Beberapa hal yang perlu dipahami Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Bakorwil I Madiun terkait prosedur lalu lintas ternak qurban pada tahun 2024 antara lain :
3. Tata cara dan prosedur lalu lintas ternak qurban tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan lalu lintas, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Para pelaku usaha ternak dan produk peternakan wajib menggunakan aplikasi lalu lintas HPM melalui sistem ISIKHNAS dalam melalulintaskan hewan dan produk hewan sebagaimana Surat Edaran dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor : s87/TU.020/F4/02/2024 tanggal 5 Pebruari 2024.
5. Penginputan data terkait penyakit hewan ternak qurban dilakukan secara realtime melalui ISIKHNAS (System Informasi Kesehatan Hewan Nasional).
6. Lalu Lintas HPM anatar wilayah provinsi wajib menggunakan aplikasi lalulintas ISIKHNAS, sedangkan lalu

lintas HPM antar wilayah Kota/kabupaten di Wilayah Provinsi Jawa Timur bisa menggunakan aplikasi ISIKHNAS atau manual.

7. Pemerintah Kabupaten/Kota agar mensosialisasikan kepada masyarakat terkait standar prosedur kualitas pakan dan kandang hewan ternak.
8. Tetap dilakukannya vaksinasi untuk hewan ternak di tiap daerah.
9. Dalam rekomendasi pengeluaran dan pemasukan hewan ternak harus mempertimbangkan status penyakit antara wilayah asal ternak dan wilayah tujuan ternak.
10. SOP Lalu lintas ternak qurban tahun 2024 akan segera dikeluarkan oleh Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Provinsi Jawa Timur.

7. Koordinasi dan Monitoring Ketersediaan Ternak Qurban Menghadapi Hari Raya Idul Adha 1445 H Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 11 Juni 2024.

Surat Kepala Bakorwil Madiun tanggal 12 Juni 2024 Nomor : 500.7/189.2/211.3/2024 kepada Bapak Pj. Gubernur Jawa Timur melalui Bapak Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur perihal Laporan Hasil Koordinasi dan Monitoring Ketersediaan Ternak Qurban Menghadapi Hari Raya Idul Adha 1445 H Tahun 2024 se Bakorwil I Madiun :



1. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 H Tahun 2024, Bakorwil I Madiun telah melaksanakan Monitoring Ketersediaan Ternak Qurban pada Kabupaten/Kota yang ada di Wilayah Bakorwil I Madiun ;
2. Untuk mengantisipasi penyebaran penyakit pada hewan ternak qurban di daerah, Dinas Peternakan Kabupaten/Kota bersama petugas kesehatan hewan telah melaksanakan



- pemeriksaan kesehatan secara rutin pada hewan ternak qurban ;
3. Lalu Lintas hewan ternak qurban anatar wilayah (antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jawa Timur dan antar provinsi) harus disertai dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau Sertifikat Veteriner dan sudah divaksin ;
 4. Para pelaku usaha ternak telah menggunakan aplikasi lalulintas hewan melalui system ISIKHNAS dalam melalulintaskan hewan ternak qurban sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 17 tahun 2023 ;

8. Rapat Koordinasi Penyusunan Formulir Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Kabupaten/Kota se Bakorwil I Madiun Tahun 2024. Dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2024.

Surat Kepala Bakorwil Madiun tanggal 30 Agustus 2024 Nomor : 500.6.26/285/211.3/2024 kepada Bapak Pj. Gubernur Jawa Timur melalui Bapak Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Formulir Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Kabupaten/Kota se Bakorwil I Madiun Tahun 2024 :



1. Motivasi dan pemahaman pentingnya perlindungan hukum Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) kepada Pemerintah Daerah / masyarakat berupa Espresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, dan Potensi Indikasi Geografis merupakan asset yang mencerminkan identitas budaya. Kearifan lokal, serta warisan nenek moyang yang perlu dilestarikan di Wilayah Bakorwil I Madiun ;
2. Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Wilayah Bakorwil I Madiun belum terdata secara menyeluruh, diperlukan inventarisasi dan pencatatan sehingga dapat terlindungi secara maksimal dan dapat memberikan manfaat secara ekonomi ;

		<p>3. Identifikasi dan pencatatan Kekayaan Intektual Komunal (KIK) di Wilayah Bakorwil I Madiun dapat dilaporkan sebagai berikut (terlampir) ;</p>
<p>9.</p>	<p>Rapat Koordinasi Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota se Bakorwil I Madiun Tahun 2024. Dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2024.</p>   	<p>Surat Kepala Bakorwil Madiun tanggal 31 Oktober 2024 Nomor : 500.13/418/211.3/2024 kepada Bapak Pj. Gubernur Jawa Timur melalui Bapak Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota se Bakorwil I Madiun Tahun 2024 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antara berbagai pihak dalam pengembangan ekonomi kreatif, diharapkan dapat menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan, mendukung pelaku usaha, serta mengembangkan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi kreatif di Wilayah Bakorwil I Madiun ; 2. Komite Ekonomi Kreatif dapat menjadi penggerak utama dalam memajukan ekonomi berbasis kreativitas serta menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan industri kreatif, yang dapat menggairahkan perekonomian dengan melibatkan generasi millennial yang mempunyai karakter kreatif dan inovatif ; 3. Dalam mendukung pengembangan Kabupaten/Kota Kreatif diharapkan Komite Ekonomi Kreatif mampu menguatkan dan berfokus pada peningkatan inovasi dan kewirausahaan bagi pelaku industry

kreatif di Wilayah Bakorwil I Madiun, berdasarkan keunggulan serta ciri khas yang dimiliki dalam setiap sub sektor ekonomi kreatif di daerah sehingga dapat memberikan banyak manfaat dan dampak baik bagi masyarakat di daerah sekitar.

4. Di Wilayah Bakorwil I Madiun dari 10 (sepuluh) Kabupaten dan Kota , 1 (satu) Kabupaten menjadi Kabupaten Kreatif yaitu Kabupaten Ponorogo dan 1 (satu) Kabupaten menuju Kabupaten Kreatif pada tahun ini yaitu Kabupaten Trenggalek. Diharapkan dengan Rapat Koordinasi ini menjadikan awal komunikasi dan koordinasi serta bertukar pengalaman bagi Kabupaten/Kota yang lain untuk menuju Kabupaten/Kota Kreatif.

10. Koordinasi dan Monitoring Program Adiwiyata di Kabupaten/Kota se wilayah Bakorwil I Madiun yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari s.d 3 Maret 2024



Surat Kepala Bakorwil I Madiun kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tanggal 19 Maret 2024 nomor : 600.4 / 100 / 211.5 / 2024 perihal Hasil Koordinasi dan Monitoring Program ADIWIYATA di Kabupaten/Kota Se Bakorwil I Madiun Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Perlu adanya pemahaman tentang pendidikan lingkungan hidup kepada warga sekolah (siswa, guru, pegawai dan komite) serta masyarakat di sekitarnya tentang upaya pengelolaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. Menumbuhkan kesadaran sejak dini akan pentingnya upaya pelestarian lingkungan kepada peserta didik (siswa) dan warga sekolah lainnya dalam upaya meningkatkan nilai-nilai dan rasa kepedulian pada pelestarian

		<p>lingkungan hidup di tengah masyarakat;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Perlunya sinergitas program ADIWIYATA antar dinas/instansi (Dinas Lingkungan Hidup Kab./Kota, Dinas Pendidikan Kab./Kota serta Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur) dalam rangka mendorong dan memberikan pemahaman tentang ADIWIYATA di lingkungan sekolah dalam rangka menumbuhkan kesadaran dini akan pentingnya kelestarian lingkungan 4. Perlunya pendampingan program ADIWIYATA khususnya tingkat SMA/SMK dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang setelah beralih kewenangan Provinsi Jawa Timur jarang dilakukan pendampingan.
11.	<p>Koordinasi dan Monitoring Infrastruktur Irigasi di wilayah Bakorwil I Madiun yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus s.d 4 September 2024</p>  	<p>Surat Kepala Bakorwil I Madiun kepada Kepala UPT PSDA WS Bengawan Solo di Bojonegoro dan Kepada Kepala UPT PSDA WS Brantas di Kediri tanggal 12 September 2024 nomor 600.1/309/211.5/2024 perihal Rekomendasi hasil Koordinasi dan Monitoring Infrastruktur Irigasi di wilayah Bakorwil I Madiun Tahun 2024 sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya menentukan skala prioritas dalam penganggaran untuk rehabilitasi maupun pemeliharaan saluran/jaringan irigasi berdasarkan urgensi dan akibat yang ditimbulkan dari kerusakan saluran/jaringan dimaksud agar kebutuhan irigasi persawahan tetap dapat berjalan dengan baik dan lancar. 2. Perlunya membuat usulan kepada Dinas PU SDA terkait sumber daya

		<p>manusia (SDM) untuk tenaga penjaga pintu air dan juru irigasi demi kelancaran irigasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Perlunya meningkatkan sinergi antara Pengamat OP wilayah Provinsi dengan juru maupun PPA dari Kabupaten/Kota dalam rangka mengantisipasi kekurangan personil PPA dan juru irigasi di lapangan.
<p>12.</p>	<p>Koordinasi dan Monitoring Kelompok Tani Hutan di wilayah Bakorwil I Madiun Tahun 2024</p>  	<p>Surat Kepala Bakorwil I Madiun kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur wilayah Madiun, Pacitan dan Trenggalek tanggal 30 Juli 2024 nomor 500.4/ 252 / 211.5 / 2024 perihal Rekomendasi Hasil Koordinasi dan monitoring Kelompok Tani Hutan di wilayah Bakorwil I Madiun Tahun 2024 sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sosialisasi terkait informasi program kegiatan pengelolaan lahan hutan kepada Ketua KTH, Pokja dan anggota KTH 2. Belum optimalnya pemberdayaan dan penguatan kelembagaan Kelompok Tani Hutan Bersama pendamping/penyuluh dalam pemanfaatan perhutanan social 3. Para anggota kelompok tani hutan masih berfikir secara individu untuk mengolah lahan dan belum adanya kedadaran bersama kelompok tani hutan dalam pengelolaan perhutanan social 4. Belum adanya pendampingan dan pelatihan dari tenaga ahli untuk potimalisasi pengelolaan lahan hutan dan tanaman 5. Belum adanya kerjasama dan sinkronisasi yang tepat antara BUMN,

		BUMD dan swasta dalam membantu kelompok tani hutan
13.	<p>Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Pertambangan di wilayah Bakorwil I Madiun Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 30 September s.d 10 Oktober 2024</p>  	<p>Surat Kepala Bakorwil I Madiun kepada Bupati se Bakorwil I Madiun tanggal 22 Oktober 2024 nomor 500.10.2.3/385.2/211.5/2024 Perihal rekomendasi hasil Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Pertambangan di wilayah Bakorwil I Madiun Tahun 2024 sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya koordinasi antara pemegang ijin pertambangan dengan Pemerintah Kabupaten terkait terbitnya surat ijin melakukan kegiatan pertambangan sehingga Pemerintah Kabupaten tidak mengetahui apabila pemegang ijin sudah melakukan kegiatan pertambangan 2. Dari hasil kegiatan koordinasi dan monitoring perlu adanya koordinasi antara dinas terkait dalam melakukan pengawasan dalam kegiatan pertambangan baik dari segi perijinan, dampak lingkungan dan dampak social yang ada di kawasan sekitar pertambangan 3. Peran Pemerintah Kabupaten sangat penting dalam melakukan pengawasan karena lokasi pertambangan berada di wilayah kabupaten masing-masing dalam rangka untuk pencegahan permasalahan yang berkaitan dengan masalah pertambangan.
14.	<p>Koordinasi dan monitoring kegiatan ketenagakerjaan Di Wilayah Bakorwil I Madiun</p>	<p>Surat Kepala Bakorwil I Madiun Kepada Bupati/Walikota se Bakorwil I Madiun, Nomor : 500.15/158.1/211.4/2024 tanggal 5 April 2024 Perihal Rekomendasi Hasil koordinasi dan monitoring kegiatan ketenagakerjaan Di Wilayah Bakorwil I Madiun sebagai berikut :</p>



1. Dari 10 Kabupaten/Kota di wilayah Bakorwil I Madiun:
 - a. Baru 1 (satu) Kabupaten yang telah membentuk Unit Pelayanan Disabilitas akan tetapi fungsi dan perannya belum maksimal.
 - b. Belum ada BUMN/BUMD yang memiliki karyawan penyandang disabilitas.
 - c. Masih sebagian kecil Perusahaan swasta yang telah mempekerjakan penyandang Disabilitas.
2. Agar pemenuhan pekerjaan penyandang disabilitas dapat terpenuhi sesuai yang diamanatkan dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas , maka diharapkan Kabupaten/Kota dapatnya menghimbau kepada BUMN/BUMD dan perusahaan swasta untuk memberikan kesempatan kerja kepada penyandang disabilitas.

15. Koordinasi dan monitoring Upaya Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten/Kota se wilayah Bakorwil I Madiun

Surat Kepala Bakorwil I Madiun Kepada Ketua TPPS Provinsi Jawa Timur, Nomor : 400.7/261.6/211.4/2024, tanggal 5 Agustus 2024 Perihal Rekomendasi Koordinasi dan monitoring Upaya Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten/Kota se wilayah Bakorwil I Madiun sebagai Berikut :



1. TPPS melakukan advokasi ke pimpinan daerah, untuk aktif berperan dalam melakukan intervensi spesifik dan sensitif , terutama fokus kepada :
 - a. Meningkatkan cakupan kehadiran ke posyandu (D/S) rutin setiap bulan dengan target 100%.
 - b. Meningkatkan surveilans gizi melalui aplikasi si Gizi terpadu dengan cakupan entri data di e-PPGBM 100% real time di bulan berjalan, sehingga datanya dapat menggambarkan kondisi riil dilapangan dan sebagai

		<p>bahan pengambilan Keputusan di level Pusat, Provinsi dan Daerah (kab/kota, kecamatan, desa/kelurahan)</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Melakukan intervensi spesifik dan sensitive berdasarkan hasil pemetaan penyebab masalah gizi (Pola Asuh, akses pangan, penyakit/ infeksi) dengan penanganan kasus per kasus di level desa serta melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin hasil pelaksanaan intervensi tersebut d. Pemberian PMT lokal difokuskan pada balita tidak naik berat badan dan balita underweight. karena balita ini belum masuk dalam sasaran penerima PMT lokal. <p>2. Untuk percepatan kepemilikan NIK pada bayi baru lahir dapat dilaksanakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi kepada masyarakat bahwa bayi yang lahir diluar nikah dapat mengurus NIK dan akte kelahiran yang menerangkan anak dari seorang ibu. b. Menghimbau kepada Rumah Sakit, Puskesmas dan tempat persalinan swasta/mandiri (dokter/bidan) untuk membantu kelengkapan administrasi kepengurusan NIK dan akte kelahiran anak
16.	Rapat Koordinasi Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim di Wilayah Bakorwil Madiun	<p>Surat Kepala Bakorwil I Madiun Kepada Bupati/Walikota se Bakorwil I Madiun Nomor : 400/ 475.1/211.4/2024 tanggal 2 Desember 2024 perihal Rekomendasi hasil Rapat Koordinasi Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim di Wilayah Bakorwil Madiun sebagi berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Untuk Mempermudah pelaporan dan pemetakan data kemiskinan maupun data kemiskinan ekstrim dihimbau



untuk Kabupaten/Kota membuat Aplikasi Data Pengolah Kemiskinan Kabupaten/Kota yang dapat diintegrasikan dengan Aplikasi Sintagelis.

2. Agar tidak terjadi double pemberian bantuan maka, bagi Kabupaten/Kota yang ingin menyalurkan dana BLT DBHCHT untuk lintas wilayah, apabila telah memiliki data sasaran mohon dapatnya dikirim ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk dibandingkan dengan data milik Dinas Provinsi

17. Koordinasi dan Monitoring Eksistensi Kesenian Tradisional di Kabupaten/Kota se Bakorwil I Madiun Tahun 2024

Surat Kepala Bakorwil I Madiun Kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Nomor: 400.6.5.3/165.1/211.4/2024 Tanggal 17 Mei 2024 Perihal Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Monitoring Eksistensi Kesenian Tradisional di Kabupaten/Kota se Bakorwil I Madiun Tahun 2024 sebagai berikut :



1. Para pelaku seni perlu difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap hasil karyanya melalui layanan Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
2. Diperlukan integrasi para pelaku seni dan sanggar seni dengan lembaga Pendidikan untuk mengembangkan dan melestarikan warisan leluhur agar kesenian dan budaya tersebut tidak hilang atau musnah.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi dan memberikan ruang pada kesenian yang hampir punah untuk ditampilkan ada event di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi bahkan Pusat.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur agar memberikan dukungan dalam mengembangkan dan melestarikan kesenian dari Kabupaten/Kota wilayah Bakorwil I Madiun (mataraman) mengingat

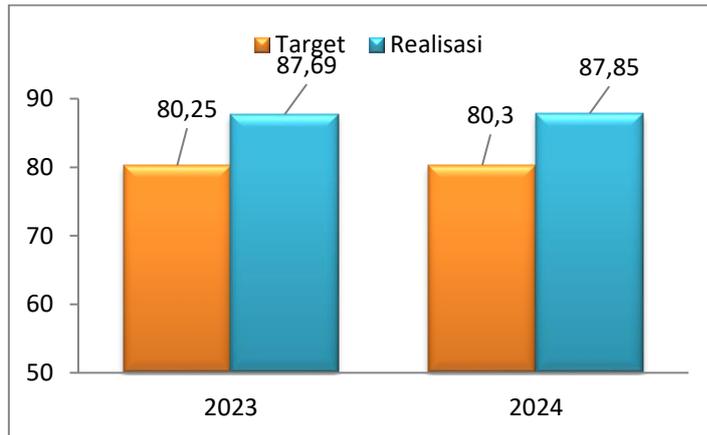
		potensi budaya dan keseniannya sangat majemuk.
		5. Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Bakorwil I Madiun mengharapkan kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) untuk dilaksanakan di tiap-tiap Bakorwil di Jawa Timur.

2. Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun lalu

Realisasi /kinerja tahun 2023 dan 2024 dibandingkan dapat dilihat pada grafik berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI	
			2023	2024	2023	2024
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bakorwil I Madiun	Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun	80,25	80,3	87,69	87,85
2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti	80%	85%	80%	90%

1. Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun



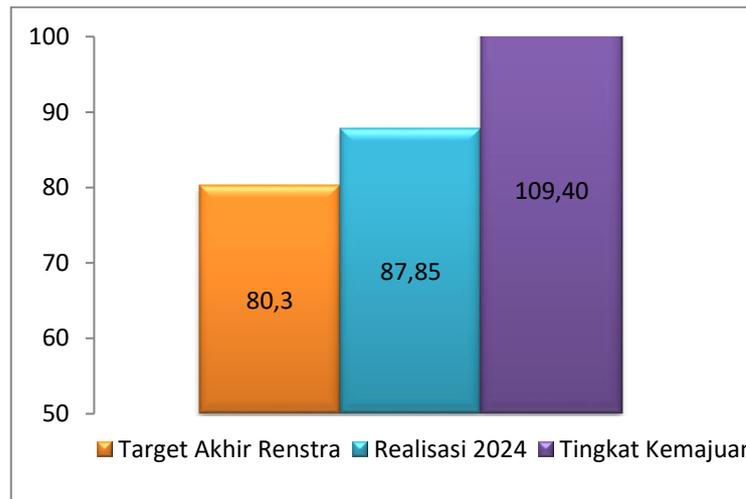
2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti



3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target akhir Renstra 2019-2024

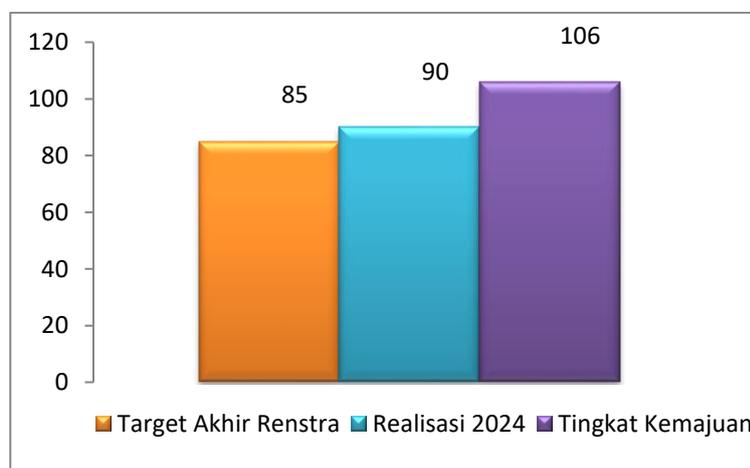
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra Bakorwil I Madiun tahun 2019-2024 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

1. Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun



Berdasarkan tabel tersebut, maka perbandingan realisasi nilai SAKIP Bakorwil I Madiun tahun 2024 sebesar **87,85** dengan target akhir Renstra Tahun 2019-2024 sebesar **80,30**, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kemajuan kinerja Bakorwil I Madiun tahun 2024 dengan target tahun akhir Renstra sebesar **109%**.

2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti



Berdasarkan tabel tersebut, maka perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 sebesar **90%** dengan target akhir Renstra Bakorwil I Madiun Tahun 2019-2024 sebesar **85%**, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kemajuan kinerja Bakorwil I Madiun tahun 2024 dalam menjalankan tugas koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan pada kabupaten/kota se-wilayah Bakorwil I Madiun mengalami tingkat kemajuan hingga tahun akhir Renstra sebesar **106%**.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pengukuran keberhasilan atau kegagalan tercermin dari capaian indikator kinerja yang ditetapkan. Indikator Kinerja Bakorwil I Madiun Tahun 2024 adalah persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti, dengan target 85%. Dari target tersebut realisasi 90% dengan capaian kinerja sebesar 113%. Capaian kinerja tersebut merupakan keberhasilan atas pelaksanaan program kegiatan atau sub kegiatan hasil koordinasi yang ditindaklanjuti baik oleh Bakorwil I Madiun atau oleh perangkat daerah terkait.

Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mengetahui **keberhasilan** Bakorwil I Madiun dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam program dan kegiatan tahun 2024 antara lain yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal dari dalam organisasi menjadi penentu atas keberhasilan Bakorwil I Madiun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi :

- a. Jumlah dan kualitas SDM yang memadai,
- b. Sarana dan prasarana penunjang yang semakin memadai,
- c. Tugas pokok dan fungsi yang jelas,
- d. Komitmen, komunikasi dan kerjasama yang baik,
- e. Capaian realisasi penyerapan anggaran yang cukup tinggi (97,01%),

- f. Program kegiatan yang dilaksanakan merupakan program kegiatan prioritas perangkat daerah,
 - g. Sasaran program/kegiatan dan indikator kinerja jelas dan terukur.
2. Faktor Eksternal
- Faktor eksternal dari luar organisasi yang ikut andil atas keberhasilan Bakorwil I Madiun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:
- a. Tersedianya dukungan anggaran dari APBD Provinsi Jawa Timur,
 - b. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan stakeholder yang baik,
 - c. Pengakuan dan peran Bakorwil yang dibutuhkan oleh pihak terkait,
 - d. Adanya pembinaan secara langsung maupun tidak langsung dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
 - e. Program kegiatan yang dilaksanakan sinergis dengan program kegiatan pemerintah kabupaten/kota atau OPD kabupaten/kota,
 - f. Manfaat program kegiatan dapat dirasakan oleh daerah atau OPD terkait dan masyarakat.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

- Aspek Manajemen: sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur

- Aspek Sumber Daya Manusia: Keterbatasan jumlah SDM terkait dan kompetensi SDM yang belum seimbang dengan jumlah pegawai, hal ini yang tentunya bisa menjadi kendala. Selama ini mengoptimalkan SDM yang ada dan mengikutkan/mengirim pegawai pelatihan baik formal maupun non formal.
- Perlunya dukungan anggaran yang proporsional untuk melaksanakan program dan kegiatan baik rutin maupun pembangunan serta tugas-tugas dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Provinsi di wilayah kerja Bakorwil I Madiun.
- Aspek Sarana dan Prasarana: Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga sering mengalami gangguan, pemeliharaan sarana dan prasarana menyebabkan beberapa tugas kedinasan ada yang belum optimal, sehingga kedepan penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana maupun pemeliharannya perlu ditingkatkan.
- Aspek Program, Kegiatan dan Penganggaran: Bakorwil I Madiun didukung oleh 2 program dengan 7 kegiatan dan 35 sub kegiatan.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun Formula Tingkat Efisiensi menggunakan formula berikut ini dengan ketentuan Capaian Kinerja telah mencapai lebih dari sama dengan 100% dan Serapan Anggaran Kurang dari 100%, yaitu :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 100\% - \% \text{ serapan anggaran}$$

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bakorwil I Madiun	Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun	109%	96,93	3.07%

2.	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti	106%	98,05	1.95%
----	--	---	-------------	--------------	--------------

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa tingkat efisiensi untuk program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar 3,07 % sedangkan pada program Pelayanan Penghubung yaitu sebesar 1,85%.

Alokasi per sasaran pembangunan dibanding dengan jumlah belanja langsung tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bakorwil I Madiun	Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun	Rp 3.115.245.000	72,41%
2.	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti	Rp 1.187.000.000	27,59%

PAPBD Bakorwil I Madiun Tahun 2024 sebesar Rp 17.891.200.000, dengan komposisi Belanja Pegawai sebesar Rp 13.588.955.000 dan belanja program sebesar Rp 4.302.245.000. Untuk sasaran strategis pertama ditunjang dengan 1 (satu) program, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp 3.115.245.000 (72,41%). Sedangkan untuk sasaran kedua ditunjang 1 (satu) program, Program Pelayanan Penghubung dengan anggaran Rp 1.187.000.000 (27,59%).

Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bakorwil I Madiun	Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun	80,3	87,85	109%	3.115.245.000	2.809.383.436	90%
Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi							
Sasaran: Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti	85%	90%	106%	1.187.000.000	1.165.555.277	98,19 %
Program: Program Pelayanan Penghubung							

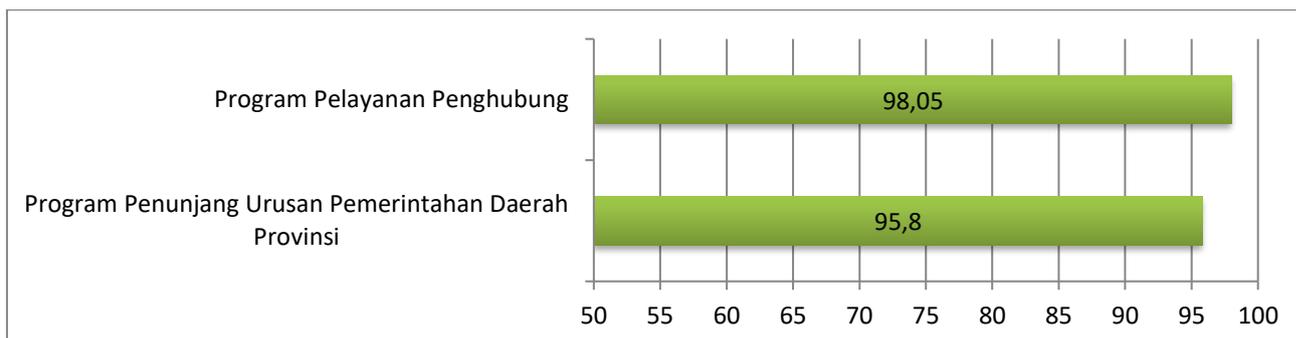
B. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan atas pelaksanaan program dan kegiatan Bakorwil I Madiun tahun 2024 berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

Adapun alokasi anggaran Bakorwil I Madiun tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Program, Kegiatan, Pagu, dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.704.200.000	16.190.636.313	96,93%
2	Program Pelayanan Penghubung	1.187.000.000	1.470.795.901	98,19%
	JUMLAH			



C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Menindaklanjuti surat Gubernur Jawa Timur tanggal 29 November 2024, Nomor: 000.8.6.3/45739/031.2/2024 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bakorwil I Madiun Tahun 2024, berikut upaya-upaya yang telah dan sedang kami lakukan:

1. Dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan publik melalui perubahan Budaya Kinerja, kami selalu melaksanakan koordinasi untuk keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan antar bidang maupun dengan perangkat daerah lain yang terkait;
2. Secara bertahap, kami telah melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada masing-masing ASN agar dalam penyusunan SKP diselaraskan dengan perjanjian kinerja yang telah disusun dan merupakan hasil breakdown perjanjian kinerja atasan langsung dan kinerja organisasi secara umum;
3. Bakorwil I Madiun selalu melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM baik secara kuantitas maupun kualitas dengan cara mengusulkan formasi tambahan ASN kepada BKD Provinsi Jawa

Timur, mengingat dari segi jumlah ASN masih kurang ideal, dan juga melakukan sosialisasi dan pelatihan internal bagi ASN Bakorwil I Madiun seperti penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja, penyusunan SKP, dan pengelolaan tata naskah dinas.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bakorwil I Madiun Tahun 2024 ini telah menyajikan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Bakorwil I Madiun pada tahun anggaran 2024. Laporan ini merupakan sarana evaluasi dan pengendalian yang sangat efektif agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran, bahwa pencapaian kinerja Bakorwil I Madiun pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun

Sasaran 1:Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bakorwil I Madiun

Indikator :Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun (**capaian 109%**)

Sasaran 2:Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun

Indikator:Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti (**capaian 106%**)

3. Capaian realisasi anggaran Bakorwil I Madiun tahun 2024 sebesar **97,01%**

B. Langkah yang akan dilakukan

1. Bakorwil I Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berupaya meningkatkan koordinasi, komunikasi, sinkronisasi, kerjasama dan monitoring serta evaluasi dengan stakeholder terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar kinerjanya dapat meningkat;
2. Optimalisasi mekanisme manajemen internal Bakorwil I Madiun agar tertib administrasi sesuai dengan ketentuan atas penyusunan dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan program dan kegiatan serta dokumen pelaporan maupun evaluasi;
3. Berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM Bakorwil I Madiun agar memiliki kompetensi yang memadai.

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
2. Cascading Kinerja
3. Peta Proses Bisnis